

Penelitian

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI LAYANAN PENDIDIKAN MASYRAKAT

Anan Sutisna

e-mail: ananplsunj@yahoo.com

Pendidikan Luar Sekolah, FIP Universitas Negeri Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui layanan pendidikan masyarakat pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di DKI Jakarta. Penelitian yang dilaksanakan Agustus sampai dengan Desember 2012 ini menggunakan metode survei, yakni dengan teknik deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) layanan program pendidikan masyarakat yang paling banyak diikuti oleh responden adalah pendidikan kesetaraan sebesar 61,4%, dan jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 75,8% , (2) pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui pendidikan masyarakat sebesar 61,5%. Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender melalui pendidikan masyarakat, dipandang sangat strategis dengan pengintegrasian berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah dengan program life skill. Sehingga akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri.

Kata Kunci: pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, layanan pendidikan masyarakat.

WOMAN EMPOWERMENT AND GENDER EQUALIZATION THROUGH COMMUNITY EDUCATION SERVICE

Abstract: *The purpose of this research is to describe woman empowerment and gender equalization through community education service at Community Learning Activity Center in Jakarta. The research which was conducted as from Agust through December 2012 used survey method with descriptive questionnaire and the data were analyzed descriptively . The findings showed (1) the education community service program mostly undertaken by the respondents (61.4%) is gender equalization, and the female respondents of the research is 75.8%. (2) Woman empowerment and gender equalization through community education service is 61.5%. The woman empowerment and gender equalization is regarded as very strategic by integrating various programs designed by the government known as life skills to create good, intelligent, and independent human resources.*

Keywords: woman empowerment, gender equalization, community education service.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia pada tahun 2006 sekitar 5,39 juta orang yang tidak bisa baca tulis (buta huruf) yang terdiri dari 2,80 juta orang usia 10 – 44 tahun dan 2,59 juta orang usia 44 tahun ke atas. Penyandang buta aksara tertinggi 65% adalah kaum perempuan karena keterbatasan perempuan dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengakibatkan banyak masalah (Depdiknas, 2006). Misalnya korban *trafficking* (perdagangan orang), narkoba, tindak kekerasan rumah tangga, dan lain sebagainya. Begitu juga di bidang ketenagakerjaan masih terjadi kesenjangan pada tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat upah yang diterima, kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri atau predikat negara pengirim tenaga kerja

wanita tertinggi dengan perlindungan minim, pekerja tak dibayar dan pekerja informal.

Belum lagi masalah pemahaman terhadap kesehatan perempuan Indonesia masih rendah, hal ini terlihat dari beberapa indikator antara Angka Kematian Ibu (AKI) saat itu masih tertinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor status kesehatan reproduksi, status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, ekonomi keluarga yang rendah, serta status dan kedudukan perempuan yang rendah dalam masyarakat. Isu lain yang tidak kalah menariknya adalah rentannya perempuan terhadap penyakit menular (HIV/AIDS) terutama daerah padat penduduk, perbatasan dan daerah wisata karena kurangnya pengetahuan HIV/AIDS (Kompas, 12 Maret 2011).

Keterbatasan dalam pengetahuan, serta adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin membuat parah kaum perempuan di Indonesia, membuat perempuan tidak berdaya. Misalnya, di lihat dari segi adat yang berlaku di masyarakat adat, yakni patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Masyarakat patrilineal, seperti suku Batak, Lampung, dan Flores, anak laki-laki akan menjadi pewaris serta kepala keluarga pengganti ayah. Padahal, yang biasa mengerjakan mencari nafkah lebih banyak yang perempuan mengurus ladang, rumah serta pekerja lainnya. Namun dalam pengambilan keputusan, perempuan tidak punya hak dalam memberikan saran maupun pendapat. Demikian mamakala (paman laki-laki) yang memiliki kekuasaan pengaturannya. Seringkali paman juga ikut mengambil bagian dari warisan tersebut, dan bahkan menguasainya. Adapun dalam masyarakat bilateral, seperti di Jawa lebih pada menerima siapa yang ragil atau paling kecil yang biasanya menemani kedua orang tuanya.

Perbedaan yang paling nyata dialami oleh masyarakat yang masih terlihat sekarang adalah pada kegiatan yang ada di masyarakat. Misalnya, acara rapat RT/RW selalu diwakili kepala keluarga atau kaum laki-laki. Hanya sebagian kecil perempuan yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam lingkup masyarakat. Proses pembangunan yang dilaksanakan keterlibatan perempuan hanya sebatas melihat, mengamati, serta menerima hasil pembangunan. Keterlibatan dalam proses serta informasi perempuan hanya urutan kedua setelah laki-laki. Oleh karena itu, perlu adanya suatu program yang khusus, serta lembaga yang dapat digunakan sebagai wadah tempat perempuan mengimplementasikan kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang mendukung pembangunan.

Pendidikan nonformal merupakan salah satu alternatif yang mampu melakukan proses pemberdayaan, melalui berbagai program pendidikan masyarakat yang dapat menjembatani perempuan dalam meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemandirian (Kindervatter, 1979). Hadirnya pendidikan masyarakat sebagai alternatif pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan perempuan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, di mana tujuannya mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Proses pemberdayaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perempuan melalui layanan program pendidikan masyarakat, antara lain: Ke-

giatan Keaksaraan Fungsional, Kelompok Belajar Keterampilan (KBK), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kecakapan Hidup (*Life Skills*), dan sejenisnya dengan mempergunakan seperangkat modul/instrumen pembelajaran yang ada di PKBM, baik di desa maupun di kota seluruh Indonesia (Sihombing, 2000).

Program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan *gender* mengalami peningkatan dapat diukur dengan menggunakan *Gender Development Indeks* (GDI) dan Indeks Pemberdayaan *Gender* (GEM). Pada tahun 2004 GDI Nasional 63,9 meningkat menjadi 66,38 pada tahun 2008. Kemudian GEM pada tahun 2004 sebesar 59,7 meningkat menjadi 62,27 pada tahun 2008. Rasio kesetaraan *gender* dalam Penuntasan Buta Aksara 97,3% pada tahun 2009, sedangkan persentasi Kab/Kota pengarusutamaan *gender* 5% (Kemendiknas: 2010). Padahal sudah didukung oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* (PUG) yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat Negara, termasuk Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan dalam Program pembangunan nasional (Propernas), menyatakan bahwa pembangunan nasional harus berperspektif *gender*, sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan *gender* dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembanguna Nasional).

Strategi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui layanan pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*. Pemerintah melalui Pendidikan Masyarakat, berkewajiban melaksanakan pendidikan yang mampu menjangkau kalangan orang dewasa, sehingga orang dewasa memperoleh pendidikan yang berkelanjutan khususnya perempuan untuk lebih berdaya (Yulaelawati, 2009). Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan *gender* melalui layanan pendidikan masyarakat pada PKBM.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, terutama berkaitan dengan pemberdayaan perempuan melalui layanan pendidikan masyarakat, maka kajian ini dibatasi pada masalah: (1) layanan pendidikan masyarakat yang ada di PKBM, (2) pemberdayaan perempuan dan

perngarutamaan gender. Dengan variabel prediktor tingkat keterjangkauan perempuan dalam mengakses program-program pendidikan masyarakat yang ada pada PKBM di DKI Jakarta. Adapun perumusan masalahnya: (1) Apakah layanan program pendidikan

masyarakat yang dapat diakses oleh perempuan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Di DKI Jakarta? (2) Bagaimana pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender melalui layanan pendidikan masyarakat pada PKBM di DKI Jakarta?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan teknik deskriptif, di mana dikatakan deskriptif karena penelitian ini diarahkan guna memberi gambaran secermat mungkin mengenai individu, suatu keadaan, gejala, maupun kelompok tertentu. Pengkajian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2007). Dalam hal ini, untuk menggambarkan tentang model pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan *gender* melalui layanan program pendidikan masyarakat pada PKBM di DKI Jakarta.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 25 PKBM yang berada di lima wilayah kota yaitu: (1) Jakarta Pusat = 6 PKBM, (2) Jakarta Timur = 6 PKBM, (3) Jakarta Utara = 5 PKBM, (4) Jakarta Selatan = 6 PKBM, dan (5) Jakarta Barat 2 PKBM. Waktu penelitian selama 5 bulan terhitung mulai bulan Agustus sampai dengan Desember 2012.

Prosedur Penelitian

a. Sumber Data

Populasi penelitian ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di DKI Jakarta sebanyak 154 berdasarkan data BAN PNF tahun 2010. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*, dengan kriteria PKBM pelat merah (negeri) sebanyak 9 dan PKBM swasta sebanyak 16. Jumlah sampel 25 PKBM, di mana masing-masing PKBM yang menjadi responden adalah satu orang penanggung jawab PKBM dan empat orang warga belajar. Dengan demikian, jumlah responden seluruhnya sebanyak 91 orang.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket yang berisikan tentang layanan program-program apa saja yang dimiliki oleh PKBM dan apakah program tersebut dapat diakses oleh perempuan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk mengetahui layanan program pendidikan di PKBM, maka indikatornya: (1) perencanaan program layanan, (2) prioritas program layanan, (3) program layanan yang bersifat *topdown*, (4) melibatkan *stakeholder*, (5) prosedur layanan, (6) dampak perencanaan program, (7) perangkat

layanan, (8) *output* program, (9) proses layanan, (10) standar layanan minimal, (11) mitra program, (12) program unggulan, (13) *monitoring* dan evaluasi program, (14) kriteria keberhasilan, (15) program yang dihentikan, (16) sanksi kegagalan program, (17) evaluasi dampak, (18) program sesuai dengan visi, (19) sumber daya manusia dan sarana, serta (20) prestasi lembaga. Dengan demikian, pelayanan pendidikan masyarakat dapat diketahui, didasarkan pada hasil analisis jawaban penanggung jawab PKBM sebagai sampel dalam survei yang dilakukan pada penelitian ini.

Sedangkan tentang model pemberdayaan perempuan melalui penyebaran angket yang diberikan kepada warga belajar. Data yang dijangking, meliputi indikator sebagai berikut: (1) aktif mengikuti kegiatan, (2) pernah menjadi pengurus, (3) proaktif dalam kegiatan, (4) aktif memberikan saran, (5) sosialisasi kegiatan, (6) memperhatikan masalah, (7) berperan aktif, (8) memberikan pemikiran positif, (9) mengajak orang lain untuk ikut, (10) memiliki ide baru, (11) mengatasi masalah, (12) berpikir untuk lebih maju, (13) memberikan saran perbaikan, (14) kepuasan terhadap hasil, (15) menambah percaya diri, (16) memiliki keterampilan hidup, (17) program sesuai dengan kebutuhan, dan (18) manfaat program.

c. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan statistik deskriptif, yaitu melakukan perhitungan persentase yang akan digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, setelah data dikumpulkan dan dianalisis untuk mengetahui pemberdayaan perempuan melalui pelayanan pendidikan masyarakat yang ada di PKBM, dengan menggunakan formula rumus persentasi sebagai berikut.

$$P = \frac{\sum Xi}{N}$$

Keterangan :

P : Prosentase data

$\sum Xi$: Jumlah data yang masuk

N : Jumlah responden yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini bertujuan (1) untuk memperoleh gambaran tentang program-program layanan pendidikan masyarakat yang dapat diakses perempuan dan pengarusutamaan *gender* yang berkualitas dan berkesinambungan, dan (2) untuk menganalisis model pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan *Gender* melalui layanan pendidikan masyarakat pada PKBM di DKI Jakarta.

Deskripsi hasil kegiatan pengumpulan data tentang layanan pendidikan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di PKBM hasilnya diuraikan sebagai berikut.

Identitas Responden

Kualifikasi pendidikan responden berdasarkan data hasil survei dapat dilihat dalam tabel 1 hingga 5.

Tabel 1. Kualifikasi Pendidikan Responden

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Diploma/Sarjana	2	2,2%
2	SMA	13	14,3%
3	SMP	56	61,5%
4	SD	20	22,0%
Jumlah		91	100

Berdasarkan data dalam tabel 1, diketahui bahwa persentase tertinggi kualifikasi pendidikan responden adalah "SMP" (61,5%) dan terendah adalah "Diploma/S1" (2,2%).

Tabel 2. Umur Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	12 – 15 tahun	23	25,3
2	16 – 18 tahun	43	47,3
3	19 – 28 tahun	13	14,3
4	30 – 35 tahun	5	5,5
5	42 - 50 tahun	7	7,7
Jumlah		91	100

Berdasarkan data dalam tabel 2, diketahui bahwa persentase tertinggi umur responden adalah "16-18 tahun" (47,3%) dan terendah adalah umur "30-35 tahun" (5,5%).

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	22	24.2
2	Perempuan	69	75.8
Jumlah		91	100

Berdasarkan data dalam tabel 3, diketahui bahwa persentase tertinggi jenis kelamin responden adalah "perempuan" sebanyak 75,8% dan terendah adalah "laki-laki" sebanyak 24,2%.

Tabel 4. Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	<i>Baby Sitter</i>	3	3.3
2	Pedagang	1	1.1
3	Ibu Rumah Tangga	6	6.6
4	Jaga Toko	2	2.2
5	Karyawan	4	4.4
6	Pedagang	2	2.2
7	Pelajar	49	53.8
8	Pembantu	6	6.6
9	Pengamen	11	12.1
10	Swasta	5	5.5
11	Tidak bekerja	2	2.2
Jumlah		91	100

Berdasarkan data dalam tabel 4, diketahui bahwa persentase tertinggi jenis pekerjaan responden adalah "pelajar" (53,8%) dan terendah adalah sebagai "pedagang" (1,1%).

Tabel 5. Layanan Program Pendidikan Masyarakat

No.	Layanan Program	Jumlah	Persentase
1	Keterampilan	31	27.2
2	Kursus	12	10.5
3	Pendidikan Keaksaraan	1	0.9
4	Pendidikan Kesetaraan	70	61,4
Jumlah		114	100

Berdasarkan data dalam tabel 5, diketahui bahwa persentase tertinggi layanan program pendidikan masyarakat adalah "Pendidikan Kesetaraan" (61,4%) dan terendah adalah "Pendidikan keaksaraan" (0,9%).

Analisis Data

1. Layanan Pendidikan Masyarakat

Hasil analisis data layanan pendidikan masyarakat pada PKBM, berdasarkan sampel yang di survei pada penelitian ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Pertama, perencanaan program layanan dalam pendidikan masyarakat di PKBM dapat dilakukan melalui rapat internal lembaga atau rapat koordinasi dengan instansi lain. Hal ini terlihat dari data survei menunjukkan sebanyak 87,5% responden menjawab "ya selalu dilakukan secara periodik".

Kedua, prioritas program layanan pada pendidikan masyarakat di PKBM. Sebanyak 83,3% responden menjawab selalu dilakukan dalam upaya menuju pelayanan yang prima.

Ketiga, program layanan yang bersifat *topdown* dalam pendidikan masyarakat yang ada pada PKBM menunjukkan bahwa sebanyak 41,7% responden menjawab "selalu". Hal ini berarti masih besarnya peran pemerintah dalam program pendidikan masyarakat dari atas.

Keempat, sebanyak 70,8% responden menyatakan selalu melibatkan *stakeholder* dalam perencanaan pelayanan pendidikan masyarakat pada PKBM. Hal ini berarti agar pelayanan pendidikan masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Kelima, prosedur layanan dalam pendidikan masyarakat semestinya ada. Oleh karena itu, data menunjukkan 83,3% selalu ada prosedur pelayanan pendidikan masyarakat di PKBM.

Keenam, dampak perencanaan program dalam pelayanan pendidikan masyarakat. Dari jumlah penanggung jawab PKBM yang diteliti dalam survei hanya 83,3% menyatakan selalu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelayanan pendidikan perlu adanya perencanaan yang secara matang.

Ketujuh, perangkat layanan dalam program pendidikan masyarakat hendaknya dilengkapi. Dari jumlah penjab PKBM yang diteliti dalam survei, sebanyak 66,7% responden menyatakan selalu melengkapi perangkat pelayan.

Kedelapan, *output* program pelayanan pendidikan masyarakat hendak selalu mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Dari jumlah penjab PKBM yang diteliti, 70,8% menyatakan selalu berupaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam pembelajaran di luar sekolah.

Kesembilan, proses layanan pendidikan masyarakat yang ada di PKBM dilakukan sefleksibel mungkin. Dari jumlah penjab PKBM yang diteliti, 75,0% menyatakan selalu membuat langkah-langkah yang sederhana dalam melakukan pelayanan.

Kesepuluh, standar layanan minimal dalam pendidikan masyarakat perlu disusun oleh penanggung jawab PKBM. Dari data yang ada, menunjukkan bahwa sebanyak 75,0% responden selalu mengembangkan standar minimal pelayanan.

Kesebelas, mitra program dalam pelayanan pendidikan masyarakat sangat diperlukan. Dari jumlah penjab PKBM yang diteliti, 45,8% menyatakan selalu melakukan kemitraan dalam pendidikan masyarakat.

Keduabelas, program unggulan pendidikan masyarakat dari setiap lembaga mestinya ada. Dari

jumlah penjab PKBM yang diteliti, 58,3% menyatakan selalu merencanakan suatu program unggulan di lembaganya.

Ketigabelas, *monitoring* dan evaluasi program pelayanan pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh PKBM. Dari jumlah penjab yang diteliti, 75,0% menyatakan selalu melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap layanan pendidikan masyarakat.

Keempatbelas, kriteria keberhasilan pelayanan pendidikan masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan penilaian. Dari data survei menunjukkan bahwa para penanggung jawab, 79,2% selalu membuat kriteria keberhasilan layanan pendidikan masyarakat di lembaganya.

Kelimabelas, program yang dihentikan dalam masa berlangsungnya suatu kegiatan pendidikan masyarakat di PKBM, menunjukkan 87,5% responden menyatakan tidak ada suatu program pendidikan masyarakat yang diberhentikan ditengah berlangsungnya kegiatan.

Keenambelas, sanksi kegagalan program pelayanan pendidikan masyarakat masih belum ada ketegasan. Dari jumlah penjab PKBM yang diteliti, 70,8% menyatakan selalu ada sanksi kalau terjadi kegagalan dalam pelayanan program pendidikan masyarakat.

Ketujuhbelas, evaluasi dampak yang dilakukan dalam pelayanan pendidikan masyarakat belum dilakukan secara optimal. Dari jumlah penjab PKBM yang diteliti, 62,5% menyatakan selalu melaksanakan evaluasi dampak walaupun hasil dari melaksanakan evaluasi dampak tersebut banyak yang belum ditindak lanjuti.

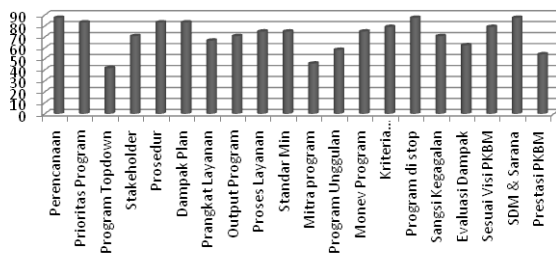
Kedelapanbelas, program pelayanan pendidikan masyarakat sesuai dengan visi lembaga. Dari jumlah penjab PKBM yang diteliti, 79,2% menyatakan selalu menyusun program pelayanan sesuai dengan visi dan misi lembaga

Kesembilanbelas, sumber daya manusia dan sarana dalam pelayanan pendidikan masyarakat sangat masih kurang. Dari jumlah penjab PKBM yang diteliti, 87,5% menyatakan selalu merencanakan pelayanan pendidikan masyarakat sesuai dengan SDM dan sarana yang ada di lembaga.

Keduapuluh, prestasi lembaga dalam melakukan pelayanan pendidikan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, data survei menunjukkan, 54,2% selalu berkeinginan untuk memperoleh prestasi dalam pelayanan pendidikan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sistem layanan program pendidikan masyarakat pada PKBM di DKI Jakarta dapat terlihat pada gambar 1.

SISTEM LAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT



Gambar 1. Persentasi dari Setiap Indikator Layanan Pendidikan Masyarakat

2. Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan analisis data model pemberdayaan dan pengarusutamaan gender pada PKBM terhadap sampel survei pada penelitian ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Kehadiran warga belajar setiap kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan di PKBM, data survei menunjukkan 57,1% menjawab “ya selalu” hadir dalam setiap kegiatan pendidikan masyarakat. Aktivitas dalam program pendidikan masyarakat, dimana warga belajar yang pernah menjadi pengurus/penge- lola, data survei menunjukkan 64,8% “tidak pernah”. Sedangkan keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan di PKBM, data survei menunjukkan 49,7% menjawab “ya selalu” ikut serta.

Aktif memberikan saran dalam program pendidikan masyarakat yang dilaksanakan di PKBM, data survei menunjukkan 41,8% jawaban responden adalah “kadang-kadang” dalam memberikan saran. Sedangkan dalam melakukan sosialisasi pendidikan masyarakat di luar PKBM bersama teman, saudara atau orang lain, data survei menunjukkan 58,2% menjawab “ya selalu” memberitahukan ke orang lain. Selanjutnya, memperhatikan masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat selama ini, 51,6% menjawab “ya selalu” memperha- tikan pelaksanaan pendidikan masyarakat.

Untuk peran aktif yang dilakukan dalam setiap pendidik-an masyarakat yang ada di lingkungan PKBM, jawaban responden adalah “ya selalu” ber- peran aktif sebesar 39,6%. Berikutnya, berpikir keras untuk lebih memajukan program pendidikan masyara- kat di PKBM, jawaban responden adalah “ya selalu” sebesar 54,9%. Sedangkan dalam mengajak orang lain untuk belajar secara kelompok dalam kegiatan

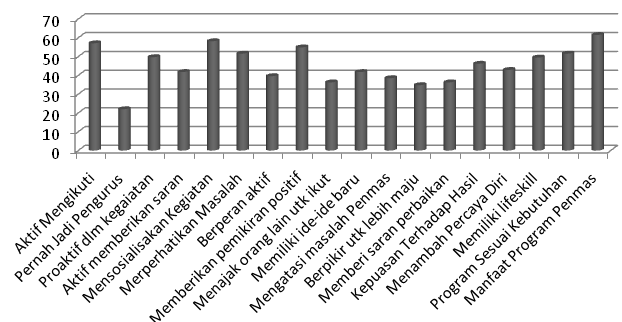
pendidikan masyarakat di PKBM, jawaban responden adalah “kadang-kadang” sebesar 36,3%.

Ide baru atau pemikiran baru dalam pendidikan masyarakat di lingkungan PKBM, jawaban respon- den adalah “kadang-kadang” sebesar 41,8%. Dalam mengatasi masalah yang ada dalam pelaksanaan pendidikan masyarakat di PKBM, jawaban responden adalah “tidak pernah” sebesar 38,5%. Sedangkan dalam memikirkan kemajuan pendidikan masyarakat yang ada sekarang di PKBM untuk lebih maju lagi, jawaban responden adalah “ya selalu” sebesar 34,8%. Lain halnya dalam menyampaikan suatu usulan per- baikan terhadap pelaksanaan pendidikan masyarakat di PKBM, jawaban responden adalah “ya selalu” sebesar 36,3%.

Untuk kepuasan terhadap hasil kegiatan pen- didikan masyarakat yang dilaksanakan dalam PKBM selama ini, jawaban responden adalah “sering” sebe- sar 46,2%. Responden yang mengikuti kegiatan pen- didikan masyarakat menjadi lebih percaya diri, sebesar 42,9% menjawab “ya selalu”; mengikuti pendidikan masyarakat memperoleh keterampilan hidup yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga, jawaban responden adalah “sering” sebesar 49,5%. Sedangkan kegiatan pendidikan masyarakat yang diikuti sudah sesuai kebutuhan masyarakat, jawaban responden adalah “sering” sebesar 51,6%, serta manfaat dari pelaksanaan program pendidikan masyarakat yang ada di PKB, jawaban responden adalah “ya selalu” sebesar 61,5%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberdayaan perempuan melalui program pendid- ikan masyarakat pada PKBM di DKI Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut:

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PENMAS DI PKBM



Gambar 2 . Persentasi dari Setiap Indikator Pemberdayaan Perempuan

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian tentang model pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan *gender* melalui layanan pendidikan masyarakat pada PKBM di Provinsi DKI Jakarta, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, layanan program pendidikan masyarakat yang paling banyak diikuti oleh masyarakat adalah Pendidikan Kesetaraan sebesar (61,4%) dan terendah adalah pendidikan keaksaraan (0,9%). Sedangkan, berdasarkan jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah perempuan sebanyak 75,8% dan laki-laki sebanyak 24,2%.

Kedua, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan *gender* melalui pendidikan masyarakat menunjukkan bahwa: (1) 57,1% perempuan aktif mengikuti kegiatan; (2) 64,8% tidak jadi pengurus; (3) 49,7% proaktif dalam kegiatan; (4) 41,8% aktif memberikan saran; (5) 58,2% menyebarkan kegiatan; (6) 51,6% memperhatikan masalah; (7) 39,6% berperan aktif; (8) 54,9% memberikan pemikiran positif; (9) 36,3% mengajak orang lain untuk ikut; (10) memiliki ide baru 41,8%; (11) 38,5% mengatasi masalah; (12) 34,8% berpikir untuk lebih maju; (13) 36,3% memberikan saran perbaikan (14) 46,2% kepuasan terhadap hasil, (15) 42,9% menambah percaya diri, (16) 49,5% memiliki keterampilan hidup, (17) 51,6% memberikan program sesuai dengan kebutuhan, dan (18) 61,5% merasakan manfaat mengikuti program pendidikan masyarakat.

Ketiga, pemberdayaan perempuan dan penga-

rusutamaan *gender* melalui layanan pendidikan masyarakat dipandang sangat strategis, sehingga akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, perlu dirumuskan beberapa saran kepada pihak yang dipandang sangat terkait dan relevan. *Pertama*, Pembina kelembagaan PKBM, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkewajiban melakukan pembinaan terhadap para penanggung jawab PKBM yang ada di lingkungan DKI Jakarta umumnya dan khususnya para Kepala Seksi PNFI, untuk meningkatkan layanan pendidikan masyarakat di PKBM lebih berkualitas, karena sangat strategis dalam pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan *gender*.

Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, diharapkan mampu mendorong pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan *gender* ini dengan berbagai kebijakan tentang program-program pendidikan masyarakat yang lebih praktis dan efektif. Sehingga menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan mandiri.

Ketiga, Para peneliti berdasarkan hasil kajian teori penelitian ini ada yang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, yang terkait dengan efektivitas model pemberdayaan perempuan melalui pendidikan masyarakat pada PKBM di DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Profil Direktorat pendidikan masyarakat*. Jakarta: Ditjen. PNFI Depdiknas.
- Yulaelawati, E. (2009). *Pendidikan masyarakat untuk pemberdayaan*. Jakarta: Ditjen. PNFI Depdiknas.
- Instruksi Presiden Nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender*. 2000. Jakarta: Depdiknas.
- Kindervatter, S. (1979). *Nonformal education as an empowering process with case studies from Indonesia and Thailand*, USA: Massachusetts.
- Sihombing, U. (2000). *Pendidikan luar sekolah manajemen strategis, konsep kiat dan pelaksanaan*. Jakarta: PD. Mahkota.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Program Pembangunan Nasional. 2000. Jakarta: Depdiknas.
- Kompas, 12 Maret 2011. *Angka Kematian Ibu (AKI) dan Masalah Sosial Perempuan*. Hal 7